

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PARIWISATA PADA DINAS
PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP PENGEMBANGAN OBJEK
WISATA PANTAI PULAU RUPAT UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



**MUHAMAD SUHENDRA
NPM: 167310913**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupat”**.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian skripsi ini.

5. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang memberikan izin pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
7. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 2021

ttd

Muhamad Suhendra

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Ilmu Pemerintahan.....	14
2. Konsep Pemerintahan.....	14
3. Konsep Pemerintahan Daerah.....	17
4. Konsep Otonomi Daerah.....	18
5. Konsep Pembangunan.....	20
6. Konsep Pariwisata.....	21
7. Konsep Objek Wisata.....	23
8. Konsep Pengembangan.....	24
9. Teori Pengembangan Pariwisata.....	25
10. Konsep Manajemen Pariwisata.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Pikir.....	36
D. Konsep Operasional.....	37
E. Operasional Variabel.....	38
F. Teknik Pengukuran.....	39
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel.....	42

D. Teknik Penarikan Sampel.....	42
E. Jenis dan Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	45
	46
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	47
B. Gambaran Umum Kecamatan Rupert Utara.....	48
C. Gambaran Umum Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.....	50
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden.....	76
B. Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupert Tahun 2019.....	79
C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupert.....	96
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Hlm
I.1 Objek Wisata pantai Kabupaten Bengkalis.....	7
I.2 Sarana dan Prasaran Objek Wisata Pantai Rupa Utara.....	8
II.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Bidang Kepariwisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.....	38
III.1 Populasi dan Sampel.....	43
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Bidang Kepariwisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.....	46
V.1 Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	76
V.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	77
V.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	78
V.4 Tanggapan Responden Dari Pengunjung Mengenai Atraksi Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.....	80
V.5 Tanggapan Dari Staff Seksi Pengembangan Objek Wisata Mengenai Atraksi Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.....	81
V.6 Tanggapan Responden Dari Pengunjung Mengenai Transportasi Dalam Pelaksanaan Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.....	83
V.7 Tanggapan Dari Staff Seksi Pengembangan Objek Wisata Mengenai Transportasi Dalam Pelaksanaan Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.....	84
V.8 Tanggapan Responden Dari Pengunjung Mengenai Fasilitas Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.....	86

V.9	Tanggapan Dari Staff Seksi Pengembangan Objek Wisata Mengenai Pengembangan Fasilitas Di Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.....	87
V.10	Tanggapan Responden Dari Pengunjung Mengenai Pengembangan Infrastruktur Pada Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.....	89
V.11	Tanggapan Dari Staf Seksi Pengembangan Objek Wisata Mengenai Pengembangan Infrastruktur Pada Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.....	90
V.12	Tanggapan Dari Pengunjung Mengenai Pengembangan Hospitally Pada Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.....	92
V.13	Tanggapan Dari Staff Seksi Pengembangan Objek Wisata Mengenai Pengembangan Hospitally Pada Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.....	93
V.14	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa Tahun 2019.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hlm
II.I.	Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Bidang Kepariwisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.....	36
IV.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.....	75



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Suhendra
NPM : 167310913
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Bidang Kepariwisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupas Utara.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyarat administratif, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konferehensif yang telah saya ikut serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manpun juga.

Pekanbaru, 16 Juli 2021
Pelaku Pernyataan,



Muhammad Suhendra

**PELAKSANAAN TUGAS BIDANG KEPARIWISATAAN PADA DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP PENGEMBANGAN OBJEK
WISATA PANTAI PULAU RUPAT**

ABSTRAK

Muhammad Suhendra

Pariwisata merupakan suatu sektor industri terpenting pada suatu negara untuk meningkatkan perekonomian negara, masa era globalisasi ini dapat dilihat banyaknya penduduk di dunia gemar melakukan perjalanan wisata dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Salah satu kabupaten yang memiliki potensi dalam sector pariwisata adalah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Objek wisata Pantai Pulau Rupas merupakan salah satu objek wisata yang cukup diminati oleh wisatawan baik local maupun mancanegara. Akan tetapi ketertarikan wisatawan tidak diimbangi dengan pengembangan objek wisata. Hal ini terlihat infrastruktur dari objek wisata yang masih kurang menunjang daya tarik pengunjung selain itu banyak sarana prasarana yang sudah mengalami kerusakan dan belum dilakukan perbaikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupas dan untuk mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupas. Adapun tipe penelitian dalam penelitian adalah termasuk kedalam tipe *Survey Deskriptif* dengan menggunakan metode *Kuantitatif*. Dari hasil kuisisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupas dapat dikatakan kurang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden sebanyak 61 %. Hal ini didasarkan pada 5 indikator yang sudah penulis tetapkan. Factor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupas adalah anggaran terbatas, rendahnya informasi mengenai objek wisata, kurangnya sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran dari masyarakat.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Tugas, Pengembangan Objek Wisata

**IMPLEMENTATION OF TOURISM TASKS AT THE DEPARTMENT OF
CULTURE, TOURISM, YOUTH AND SPORTS OF BENGKALIS
REGENCY ON THE DEVELOPMENT OF BEACH TOURISM OBJECTS
IN RUPAT ISLAND**

ABSTRACT

Muhammad Suhendra

In the current era of globalization, the tourism sector is one of the activities that has a very strategic role in supporting the development of the national economy. One of these policies is to explore, take an inventory and develop existing tourist objects as the main attraction for tourists. The Department of Tourism, Culture, Youth and Sports of Bengkalis Regency is one of the government agencies that has the task of assisting the Regent in carrying out regional government affairs based on the principle of autonomy and assistance in the fields of culture, tourism, youth and sports. The reason the author focuses on tourism development is because in Bengkalis Regency there are still many tourist objects that have not shown positive things such as an increase in the number of visitors, especially the North Rupert Beach tourist attraction, which is one of the tourist destinations in Bengkalis Regency and is currently lacking received attention from the government. The purpose of this study was to determine the implementation of the tasks of the tourism sector at the Bengkalis Regency Tourism, Culture, Youth and Sports Office on the Development of Rupert Island Beach Tourism Objects and to find out the inhibiting factors in the implementation of the tasks of the tourism sector at the Regency Tourism, Culture, Youth and Sports Office. Bengkalis to the Development of Rupert Island Beach Tourism Objects. The population in this study is the Head of Tourism, Head of the Tourism Object Development Section, Staff of the Tourism Object Development Section and visitors to the Rupert Island tourist attraction. From the results of the questionnaire and the results of interviews that the author conducted regarding the Implementation of the Tasks of the Tourism Sector at the Bengkalis Regency Tourism, Culture, Youth and Sports Office on the Development of Rupert Island Beach Tourism Objects, it can be said that the results of the recapitulation of respondents were 61%. This is based on the 5 indicators that the author has set. Inhibiting factors in the implementation of tasks in the tourism sector at the Bengkalis Regency Tourism, Culture, Youth and Sports Office on the Development of Rupert Island Beach Tourism Objects are limited budgets, low information about tourist attractions, lack of human resources and low awareness of the community.

Keywords: Implementation, Tasks, Tourism Object Development

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan sosial (masyarakat) yang di atur secara konsitusional (berdasarkan Undang-Undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah

Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kemudian di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, di dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sebagai satuan pemerintahan daerah, daerah diberi sejumlah urusan pemerintahan, yang salah satu diantaranya urusan kewenangan sehingga di daerah ada urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pasal 12 Undang-Undang 23 tahun

2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang di wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat
- f. Sosial

Urusan Pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencacatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat Desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Selanjutnya pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyataa dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi:

- a. Kelautan dan Perikanan
- b. Pertanian
- c. Kehutanan
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral
- e. Pariwisata
- f. Industri
- g. Perdagangan
- h. Ketransmigrasian

Dari sejumlah urusan-urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan pariwisata. Pariwisata merupakan suatu sektor industri terpenting pada suatu negara untuk meningkatkan perekonomian negara, masa era globalisasi ini dapat dilihat banyaknya penduduk didunia gemar melakukan perjalanan wisata. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menjadi lahan yang sangat menguntungkan bagi setiap negara. Perkembangan industri pariwisata pada suatu wilayah dapat memberikan dampak dan nilai yang positif yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan lahan kerja dan lapangan usaha, peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan keuntungan usaha milik pemerintah dan sebagainya.

Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri, disamping bernilai ekonomi yang tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga

akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa. Pariwisata adalah hal yang diminati oleh setiap individu, karena dapat menghilangkan kejenuhan, berkembangnya kreativitas dan mampu menunjang produktivitas suatu individu.

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Pasal 6: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata). Pasal 8: 1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.) serta (Pasal 12: 1) Aspek- aspek penetapan kawasan strategis pariwisata).

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang

mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Kabupaten Bengkalis memiliki potensi sector pariwisata. Disamping akan kaya sumber daya alamnya, Kabupaten Bengkalis akan berkembang sangat pesat menjadi pusat pariwisata yang berbudaya dimasa depan. Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah.

Adapun objek wisata pantai atau daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis lebih jelasnya dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.I Objek Wisata pantai Kabupaten Bengkalis

No	Objek Wisata pantai yang ada di Kabupaten Bengkalis	Jenis wisata	Keterangan
I	Pulau Rupat 1. Pantai Rupat utara	Alam	Rekreasi pantai
II	Pulau Bengkalis a. Pantai Selat Baru b. Pantai Prapat Tunggal c. Pantai Parit tiga	Alam Alam Alam	Rekreasi pantai Rekreasi pantai Rekreasi pantai

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2020

Dari sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis, penulis memfokuskan pada objek wisata Pantai Rupat Utara. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena objek wisata Pantai Rupat Utara merupakan salah satu destinasi yang cukup diminati oleh pengunjung. Objek wisata ini perlu

dikembangkan dengan peningkatan pembangunan wilayah dan konsep pariwisata. Melalui pariwisata produktif suatu wilayah akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mempunyai prospek yang baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan demikian maka pemerintah akan lebih dapat meningkatkan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Adapun sarana dan prasarana di objek wisata Pantai Rupert Utara adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2 Sarana dan Prasaran Objek Wisata Pantai Rupert Utara

No	Sarana dan Prasarana Objek Wisata	Keterangan
1	1 buah Pendopo	Kondisi baik
2	1 Buah WC	Kondisi rusak
3	2 Buah Pondok	Kondisi rusak
4	Tempat Duduk	Kondisi Rusak

Sumber : data lapangan tahun 2020

Berdasarkan tabel I.2 diatas dapat diketahui bahwa masih banyaknya sarana prasarana yang ada di objek wisata Pantai Rupert Utara yang sudah dalam kondisi rusak dan belum dilakukan perbaikan sampai saat ini.

Sejalan dengan hal diatas, untuk mengurus urusan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis membentuk Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

Adapun visi dari dinas tersebut adalah Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Daerah Wisata yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia. Dalam menjalankan visi tersebut, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai budaya melayu guna terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan .
2. Mengadakan pendataan dan penelitian benda-benda bersejarah dan kepurbakalaan .
3. Melakukan pembinaan terhadap kesenian dan kebudayaan daerah dalam rangka peningkatan sumber daya sejarawan, budayawan, sastrawan serta tokoh -tokoh adat.
4. Memberdayakan organisasi kesenian dan kebudayaan daerah .
5. Melestarikan nilai-nilai kebudayaan dan kesenian rakyat .
6. Memelihara dan melindungi benda-benda peninggalan sejarah dan benda-benda cagar alam .
7. Mengembangkan potensi daerah objek tujuan wisata .
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur objek wisata.
9. Meningkatkan peran serta kepemudaan yang berwawasan iman dan takwa.
10. Pembinaan terhadap olah ragawan berprestasi didaerah .
11. Mempromosikan seni budaya daerah dan daerah wisata baik dalam maupun luar negeri.

Adapun struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretaris
 - a. Sub bagian perencanaan dan program.
 - b. Sub bagian keuangan.
 - c. Sub bagian administrasi umum.

3. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Ekonomi Kreatif, dan
 - c. Seksi Pemasaran Pariwisata.
4. Bidang Kebudayaan, yaitu terdiri dari :
 - a. Seksi bina budaya.
 - b. Seksi Cagar Budaya, Permuseuman, dan Sejarah; dan
 - c. Seksi Kesenian.
5. Bidang Kepemudaan, yaitu terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Kepemudaan; dan
 - c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Kepemudaan.
6. Bidang olahraga, yaitu terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Olahraga, Rekreasi dan Tradisional;
 - b. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga; dan
 - c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari sekian banyak struktur organisasi yang ada pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, salah satunya adalah bidang pariwisata.

Adapun tugas bidang pariwisata adalah :

- a. Pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan teknis kewenangan dibidang pariwisata berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan dan pengendalian dibidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Penyusunan tata ruang kawasan strategis pariwisata;
- d. Pelaksanaan promosi objek wisata baik didalam maupun luar negeri;
- e. Penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan serta pengembangan pariwisata;
- f. Penyelenggaraan dan pengawasan standar minimal dalam bidang pariwisata; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugasnya.

Sejalan dengan hal diatas, salah satu tugas yang diemban oleh Bidang Pariwisata adalah Penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan serta pengembangan pariwisata. Alasan penulis memfokuskan pada pengembangan pariwisata karena di Kabupaten Bengkalis masih banyak objek wisata yang belum

menunjukkan hal yang positif seperti peningkatan jumlah pengunjung apalagi objek wisata Pantai Rupert Utara, yang mana objek wisata ini merupakan salah satu destinasi objek wisata di Kabupaten Bengkalis dan saat ini masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan hasil prasurvey yang penulis lakukan bahwa pengembangan objek wisata belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari fenomena-fenomena yang penulis jumpai dilapangan yaitu

1. Belum adanya pengembangan infrastruktur terhadap objek wisata pantai pulau rupert tersebut sehingga mempengaruhi pengunjung dan kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kampar menjadi berkurang.
2. Kurangnya daya tarik objek wisata tersebut seperti sarana prasarana untuk menarik pengunjung untuk mengunjungi objek wisata pantai pulau rupert tersebut.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang penulis uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupert Tahun 2019 ”**.

B. Rumusan Masalah

Dari sejumlah fenomena sebagaimana digambarkan diatas maka dalam tulisan ini dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

“ Bagaimana Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.
 - b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.
2. Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. **Secara teoritis**

Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Mengenai Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa.
 - b. **Secara praktis**

Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas

Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupert.

c. **Secara kontribusi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dan Dinas Pariwisata khususnya dalam rangka menggali potensi pariwisata dan sumber-sumber peningkatan Pendapatan Daerah dalam rangka pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara untuk mencapai tujuannya. (Musaneff, 2002;8).

Menurut Ndraha (2005; 7) mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (Unit Kerja Publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Syafiie (2001; 20) Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu atau seni dikatakan karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik.

2. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha (2005: 6) mendefenisikan arti pemerintahan adalah orang-orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan

pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntunan yang diperintah.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara (Yusri Munaf, 2016;47)

Selanjutnya di dalam Yusri Munaf (2016; 202) menyebutkan bahwa Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan konsep tata pemerintahan yang baik (good governance) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai Kebijakan Pemerintah dan Negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat.

Sejalan dengan hal diatas, Ndraha (2005 : 25) juga menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada 3 (tiga) adalah:

- a. Fungsi pembangunan.
- b. Fungsi pemberdayaan, dan.
- c. Fungsi peleyanan.

Defenisi pemerintahan menurut U. Rosenthal yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh JRG Djopari yang kemudian ditulis kembali oleh Syafiie

yang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dalam proses-proses pemerintahan umum (Syafiie, 2001: 32).

Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya Negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di harapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut sekalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan Kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada. (Musaneff, 2002; 15).

Adapun fungsi pemerintahan secara umum menurut Musaneff (2002; 22) adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan.
2. Pembinaan masyarakat.

Aparatur pemerintahan sebagai ujung tombak dari pada pelaksanaan pembangunan serta berfungsi sebagai pelayanan masyarakat di tuntutan untuk selalu pro aktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi persoalan yang ada. Meningkatkan tuntutan tersebut maka semua akan terjadi juga peningkatan tugas dan tanggung jawab semua aparatur Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Selama ini pemerintahan di jalankan belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan kinerja aparat masih lemah. Secara substantif, menurut Rasyid (2000; 48), tugas pemerintahan di bagi dalam 3 fungsi pokok yaitu :

- a. Pelayanan (*service*).
- b. Pemberdayaan (*empowerment*).
- c. Pembangunan (*development*).

Ketiga fungsi pemerintahan di atas memiliki keterkaitan satu sama lainnya,

yakni :

- a. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
- b. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat.
- c. Fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Dimasa orde baru pengaturan pemerintah daerah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menurut Abdul Halim (2004; 1) pemerintah daerah adalah kepada daerah dan DPRD.

Hal ini memberikan arti bahwa tidak terdapat adanya pemisahan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalannya pengawasan secara efektif.

Definisi pemerintah daerah menurut Indra Bastian (2002; 203) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepada daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Sedangkan pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti yang tercantum dalam bab I pasal 1 sebagai berikut yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I Pasal 1 pengertian pemerintah daerah adalah pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dari pengertian diatas secara umum pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

4. Konsep Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 ; 992) otonomi daerah adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diamandemen dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, definisi otonomi daerah yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundang yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007 :30). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut “daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007; 29). Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

5. Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11)

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk: 2011:3)

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa.

Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

6. Konsep Pariwisata

Pariwisata menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintahan daerah. Selanjutnya Marpaung (2000; 1) pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya.

Selanjutnya Pariwisata menurut Richardson and Fluker (dalam Pitana dan Diarta. 2009; 46) adalah

- a. Adanya unsur travel (perjalanan), yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain
- b. Adanya unsur “tinggal sementara” di tempat yang bukan merupakan tempat tinggal yang biasanya
- c. tujuan utama dari pergerakan manusia tersebut bukan untuk mencari penghidupan/ pekerjaan di tempat sasaran

Pariwisata merupakan fenomena kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok manusia kesuatu tempat untuk memnuhi kebutuhan dan keinginannya, dimana perjalanan atau nafkah, selain itu kegiatan tersebut didukung dengan berbagai fasilitas yang ada di daerah tujuan tersebut yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Pariwisata merupakan industri terbesar, dimana kegiatan pariwisata, selain itu juga meningkatkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan pendapatan perekonomian masyarakat setempat (lokal) serta menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam (ekologi) dan budaya (Ridwan. 2012; 2).

Selanjutnya menurut Mathieson dan Wall (dalam Pitana dan Diarta. 2009;46) pariwisata adalah mencakup tiga elemen utama, yaitu :

1. *a dynamic element*, yaitu *travel* ke suatu destinasi wisata
2. *a static element*, yaitu singgah di daerah tujuan
3. *a consequential element*, atau akibat dari dua hal diatas (khususnya terhadap masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.

Pariwisata menurut Suwantoro (2004; 3) adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, agama, kesehatan maupun kepentingan lainnya seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2009 (dalam Sunaryo. 2013; 99) tujuan kepariwisataan di Indonesia adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh rasa cinta tanah air
- j. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan
- k. Mempererat persahabatan antar bangsa.

7. Konsep Objek Wisata

Obyek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan (*something to see*). Di luar negeri obyek wisata disebut tourist attraction (*atraksi wisata*), sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan objek wisata.

Obyek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Menurut Yoeti (1996; 90), suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata (DTW) yang baik, harus mengembangkan tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi, yakni:

- a. Adanya sesuatu yang dapat dilihat (*something to see*), maksudnya adanya sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini obyek wisata yang berbeda dengan tempat-tempat lain (mempunyai keunikan tersendiri). Disamping itu perlu juga mendapat perhatian terhadap atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai *entertainment* bila orang berkunjung nantinya.
- b. Adanya sesuatu yang dapat dibeli (*something to buy*), yaitu terdapat sesuatu yang menarik yang khas untuk dibeli dalam hal ini dijadikan

cendramata untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing sehingga di daerah tersebut harus ada fasilitas untuk dapat berbelanja yang menyediakan *souvenir* maupun kerajinan tangan lainnya dan harus didukung pula oleh fasilitas lainnya seperti *money changer* dan bank.

- c. Adanya sesuatu yang dapat dilakukan (*something to do*), yaitu suatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu yang bisa membuat orang yang berkunjung merasa betah di tempat tersebut.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu objek wisata yang baik dan menarik untuk dikunjungi harus mempunyai keindahan alam dan juga harus memiliki keunikan dan daya tarik untuk dikunjungi dan juga didukung oleh fasilitas pada saat menikmatinya.

8. Konsep Pengembangan

Media merupakan salah satu bentuk alat bantu yang digunakan untuk meningkatkan dan memudahkan kinerja. Tuntutan terhadap kemajuan teknologi mengharuskan adanya pengembangan. Inovasi terhadap suatu media selalu dilakukan guna mendapatkan kualitas yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (*evolution*) dan perubahan secara bertahap.

Menurut Seels & Richey (Alim Sumarno, 2012; 78) pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan

pembelajaran. Sedangkan menurut Tessmer dan Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan.

Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan, sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri (Iskandar Wiryokusumo, 2011; 90).

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya pengembangan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik.

9. Teori Pengembangan Pariwisata

Suwantoro (1997; 87), menyatakan pengembangan bertujuan untuk mengembangkan produk yang pelayanan yang berkualitas, seimbang, bertahan. Sedangkan menurut Spillane dalam (Suwantoro, 1997; 90) untuk dapat

mengembangkan suatu kawasan menjadi kawasan pariwisata (termasuk juga agrowisata) ada lima unsur yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

a. *Attractions*

Merupakan pusat dari industri pariwisata. Menurut pengertiannya attractions mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tujuan adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri- ciri khas tertentu. Ciri-ciri khas yang menarik wisatawan adalah :

1. Keindahan alam
2. Iklim dan cuaca
3. Kebudayaan
4. Sejarah
5. *Ethnicity*-sifat kesukuan
6. *Accessibility*-kemampuan atau kemudahan berjalan atau ketempat tertentu.

b. *Facility*

Fasilitas cenderung berorientasi pada attractions disuatu lokasi karena fasilitas harus dekat dengan pasarnya. Fasilitas cenderung mendukung bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah *attractions* berkembang. Suatu attractions juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah dan jenis fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan. Seperti fasilitas harus cocok dengan kualitas dan

harga penginapan, makanan, dan minuman yang juga cocok dengan kemampuan

membayar dari wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut.

c. *Infrastructure*

Attractions dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di atas tanah dan suatu wilayah atau daerah. Yang termasuk infrastruktur penting dalam pariwisata adalah :

1. Sistem pengairan/air

Kualitas air yang cukup sangat esensial atau sangat diperlukan. Seperti penginapan membutuhkan 350 sampai 400 galon air per kamar per hari.

2. Sumber listrik dan energi

Suatu pertimbangan yang penting adalah penawar tenaga energi yang tersedia pada jam pemakaian yang paling tinggi atau jam puncak (*peak hours*). Ini diperlukan supaya pelayanan yang ditawarkan terus menerus.

3. Jaringan komunikasi

Walaupun banyak wisatawan ingin melarikan diri dari situasi biasa yang penuh dengan ketegangan, sebagian masih membutuhkan jasa-jasa telepon dan/atau telgram yang tersedia.

4. Sistem pembuangan kotoran/pembuangan air

Kebutuhan air untuk pembuangan kotoran memerlukan Kira-kira 90 % dari permintaan akan air. Jaringan saluran harus didesain berdasarkan permintaan puncak atau permintaan maksimal.

5. Jasa-jasa Kesehatan

Jasa kesehatan yang tersedia akan tergantung pada jumlah tamu yang diharapkan, umumnya, jenis kegiatan yang dilakukan atau faktor-faktor geografis lokal.

6. Jalan-jalan/jalan raya

Ada beberapa cara membuat jalan raya lebih menarik bagi wisatawan :

1. Menyediakan pemandangan yang luas dari alam semesta
2. Membuat jalan yang naik turun untuk variasi pemandangan
3. Mengembangkan tempat dengan pemandangan yang indah
4. Membuat jalan raya dengan dua arah yang terpisah tetapi sesuai dengan keadaan tanah
5. Memilih pohon yang tidak terlalu lebat supaya masih ada pemandangan yang indah.

d. *Transportation*

Ada beberapa usul mengenai pengangkutan dan fasilitas yang dapat menjadi semacam pedoman termasuk :

1. Informasi lengkap tentang fasilitas, lokasi terminal, dan
2. pelayanan pengangkutan lokal ditempat tujuan harus tersedia
3. untuk semua penumpang sebelum berangkat dari daerah asal.

4. Sistem keamanan harus disediakan di terminal untuk mencegah kriminalitas.
 5. Suatu sistem standar atau seragam untuk tanda-tanda lalu lintas dan simbol-simbol harus dikembangkan dan dipasang di semua bandara udara.
 6. Sistem informasi harus menyediakan data tentang informasi pelayanan pengangkutan lain yang dapat dihubungi di terminal termasuk jadwal dan tarif.
 7. Informasi terbaru dan sedang berlaku, baik jadwal keberangkatan atau kedatangan harus tersedia di papan pengumuman, lisan atau telepon.
 8. Tenaga kerja untuk membantu para penumpang.
 9. Informasi lengkap tentang lokasi, tarif, jadwal, dan rute dan pelayanan pengangkutan lokal.
 10. Peta harus tersedia bagi penumpang.
- e. *Hospitality* (keramahtamahan)
- Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum mereka kenal maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, khususnya wisatawan asing.

Pengembangan objek wisata menurut Pearce (dalam Suwanto, 1997; 90) dapat diartikan sebagai usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata,

terdapat faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan objek wisata (yoeti, 2008; 17) yaitu :

1. Tersedianya objek wisata dan daya tarik wisata
2. Adanya fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata.
3. Tersedianya fasilitas amenities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan pariwisata tidak lepas dari perkembangan politik, ekonomi, sosial dan pembangunan di sektor lainnya. Maka di dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Dari pemikiran diatas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu proses atau cara yang terjadi secara terus menerus, untuk menjadikan sesuatu objek tersebut menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Pengembangan pariwisata mempunyai dampak positif maupun dampak negatif, maka diperlukan perencanaan untuk menekan sekecil kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan. Spillane (1994; 51-62) menjelaskan dampak positif maupun dampak negatif dari pengembangan pariwisata.

Dampak positif yang diambil dari pengembangan pariwisata meliputi :

- a. Penciptaan lapangan pekerjaan, dimana pada umumnya pariwisata merupakan industri padat karya dimana tenaga kerja tidak dapat digantikan dengan modal atau peralatan.
- b. Sebagai sumber devisa negara.
- c. Pariwisata dan distribusi pembangunan spritual, disini pariwisata secara wajar cenderung mendistribusikan pembangunan dari pusat industri ke arah wilayah desa yang belum berkembang, bahkan pariwisata disadari

dapat menjadi dasar pembangunan regional. Struktur perekonomian regional sangat penting untuk menyesuaikan dan menentukan dampak ekonomis dari pariwisata.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pengembangan pariwisata meliputi :

1. Pariwisata dan vulnerability ekonomi, karena di negara kecil dengan perekonomian terbuka, pariwisata menjadi sumber mudah kena serang atau luka khususnya kalau negara tersebut sangat tergantung pada satu pasar asing.
2. Banyak kebocoran yang sangat luas dan besar, khususnya kalau proyek-proyek pariwisata berskala besar dan diluar kapasitas perekonomian, seperti barang-barang impor, biaya promosi keluar negeri, tambah pengeluaran untuk warga negara sebagai akibat dari penerimaan dan percontohan dari pariwisata dan lainnya.
3. Polarisasi spasial dari industri pariwisata dimana perusahaan besar mempunyai kemampuan untuk menerima sumber daya modal yang besar dari kelompok besar perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

10. Konsep Manajemen Pariwisata

Manajemen pariwisata menurut Leiper (dalam Pitana dan Diarta. 2009;80) adalah seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut.

Selanjutnya Menurut Leiper (dalam Pitana dan Diarta. 2009; 80) fungsi-fungsi manajemn tersebut sebagai berikut

- a. *Planning* (perencanaan).
- b. *Directing* (mengarahkan).
- c. *Organiszing* (termasuk coordinating).
- d. *Controlling* (pengawasan)

Menurut Richardon dan Fluker (dalam Pitana dan Diarta. 2009; 86) yang harus mencakup dalam manajemen pariwisata adalah

1. Memenuhi kebutuhan konsumen (wisatawan).
2. Meningkatkan kontribusi ekonomi bagi ekonomi nasional negara bersangkutan.
3. Meminimalisasi dampak pariwisata terhadap lingkungan.
4. Mengakomodasi kebutuhan dan keinginan negara tuan rumah yang menjadi tujuan wisata.
5. Menyediakan pengambilan finansial yang cukup bagi orang-orang yang berusaha di pariwisata.

Selanjutnya Menurut Pitana dan Diarta (2009;86) tujuan dari pengelolaan atau manajemen pariwisata adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk mengintegrasikan kerangka pengelolaan pariwisata. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah:

- a. Staff dari industri pariwisata
- b. Konsumen
- c. Investor dan developer
- d. Pemerhati dan penggiat lingkungan
- e. Pemerhati dan penggiat warisan dan pelestari budaya
- f. Masyarakat tuan rumah
- g. Pemerintah
- h. Pelaku ekonomi lokal dan nasional

Pengelolaan (manajemen) pariwisata menurut Cox (dalam Pitana dan Diarta. 2009; 81) pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Perservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasisi keunikan budaya dan lingkungan lokal
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktifitas pariwisata tersebut jika melampui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Darsoprajitno (2002; 403) di dunia ada dua tata manajemen yaitu manajemen alamiah yang sudah berkembang sejak dunia terbentuk, dan

manajemen binaan, yaitu manajemen yang direkayasa berdasar iptek yang dikuasai manusia

Selanjutnya Menurut Darsoprajitno (2002; 406) manajemen adalah sekelompok wisatawan dapat ditangani secara langsung kemana saja mereka pergi berwisata. Manajemen semacam ini di sebut manajemen dinamik. Tetapi ada pula sekelompok wisatawan yang melakukan pelawatan wisatanya, cukup dengan mengacu pada buku petunjuk wisata, tanpa disertai oleh pemandu wisata seorang pun. Manajemen pelawatan wisata kepada sekelompok wisatawan semacam ini disebut manajemen statik. Dalam hal ini wisatawannya dapat bergerak sendiri secara otomatis, sedang pada kelompok wisatawan yang pelawatan wisatanya ke setiap obyek dan daya tarik wisata memerlukan panduan disebut pelawatan wisata manual.

Menurut Darsoprajitno (2002; 410) Manajemen sarana pariwisata yaitu transportasi dengan jaringan penunjangannya, restorasi, dan akomodasi, yang sengaja disediakan, atau lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk sarana pariwisata.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada peneliti sebelumnya yang sudah meneliti terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Mifta Damai Riyaningsih tentang Strategi pengembangan daerah pesisir pantai sebagai obyek pariwisata di Kabupaten Konawe, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi

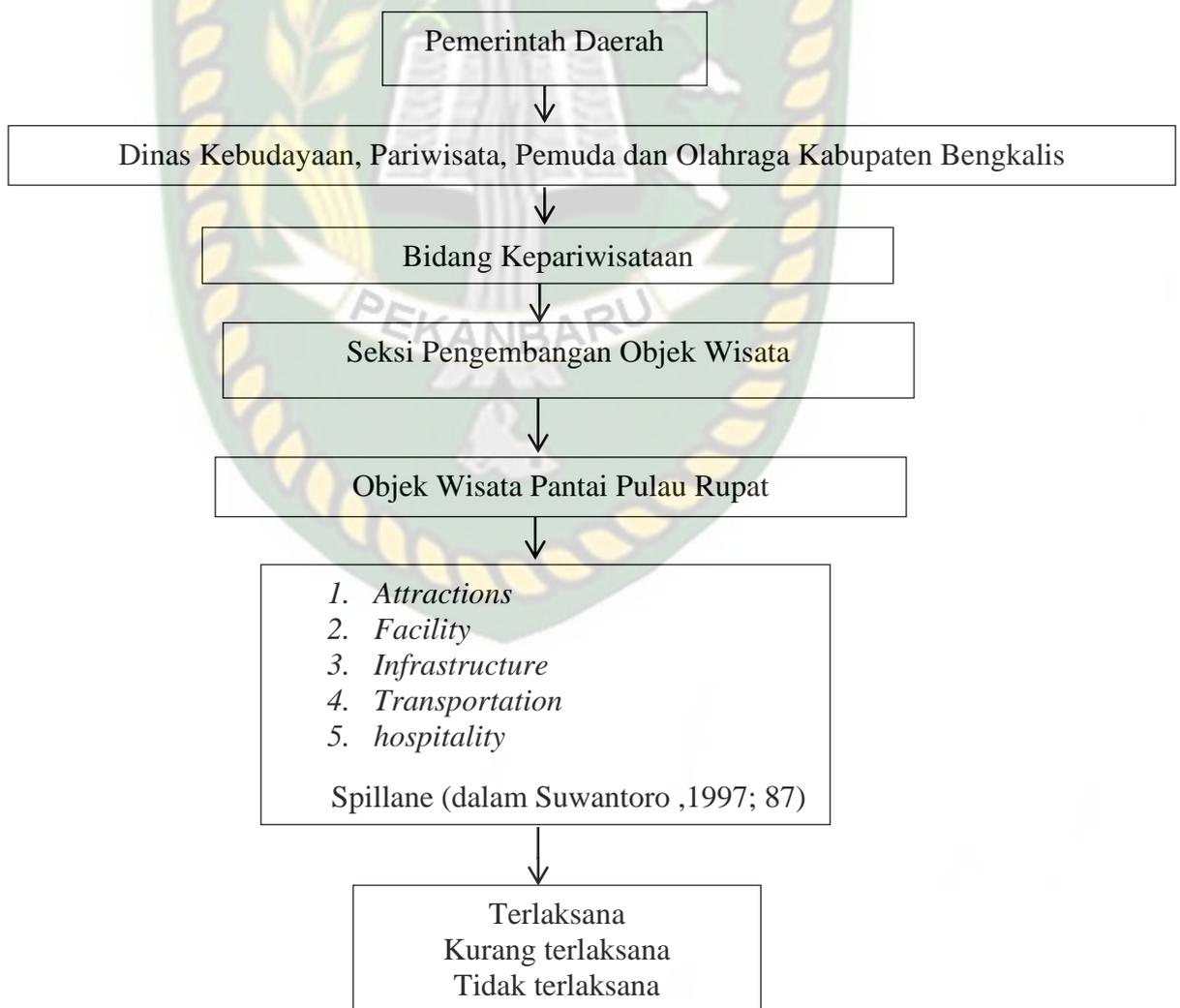
pengembangan daerah pesisir pantai sebagai obyek pariwisata yang diterapkan di Kabupaten Konawe. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana subjek penelitian ini yaitu kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, tokoh masyarakat pantai pesisir Batu Gong, Pantai Toronipa, Pantai Samudera, Permandian Air Nesowi Latoma, Pulau Bokori, Wisata Alam Abuki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan daerah pesisir di Kabupaten Konawe dimulai dengan menentukan prioritas pengembangan pantai. Dari beberapa wisata yang ada di Kabupaten Konawe beberapa pengelolaannya dengan berdasarkan tiga pilar yakni pilar good Governance yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

penelitian yang dilakukan oleh Ayu Widya Rizky “Pengelolaan Obyek Wisata Lumpur Lapindo Presfektif Muqasid Syariah”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa pengelolaan yang ada dalam obyek wisata belum mendapatkan izin baik dari PT. Lapindo maupun dari pemerintah daerah, untuk tarif retribusinya sudah menjadi kesepakatan panguyuban wisata lumpur Lapindo. Selain itu pendapatan yang didapatkan dari obyek wisata lumpur lapindo jasa ojek menjadikan penghasilan pribadi namun penjagaan portal atau karcis ada bagi rata antara penjaga sesuai pos penjaga.

C. Kerangka Pikir

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan untuk dijadikan kerangka pikiran bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan dan efisiensi dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Kepariwisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupert adalah sebagai berikut :

Gambar I.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Bidang Kepariwisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupert



D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut :

1. Pemerintahan adalah suatu aktivitas, proses dan institusi yang terbentuk atas dasar kesepakatan warga negara adalah pencerminan dari harapan, kebutuhan, dan keinginan warga negara untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib dan maju, agar setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara nyaman dan wajar
2. Pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik
3. Pengembangan objek wisata adalah sebagai usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat
4. *Attractions* adalah mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tujuan adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan.
5. *Facility* adalah Fasilitas cenderung berorientasi pada attractions disuatu lokasi karena fasilitas harus dekat dengan pasarnya. Fasilitas cenderung mendukung bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah attractions berkembang.

6. *Infrastructure* adalah Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di atas tanah dan suatu wilayah atau daerah.
7. *Transportation* adalah Ada beberapa usul mengenai pengangkutan dan fasilitas yang dapat menjadi semacam pedoman.
8. *Hospitality (keramahtamahan)* adalah Wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum mereka kenal maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, khususnya wisatawan asing.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintahan daerah

E. Operasional Variabel

Untuk lebih jelasnya mengenai konsep operasional variabel mengenai , maka dapat dilihat pada tabel II.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Bidang Kepariwisataa Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa

Konsep	Variabel	Indikator	Dimensi Sub Indikator	Skala Ukuran
Pengembangan objek wisata adalah sebagai usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat menurut Pearce (dalam	Pelaksanaan Tugas Bidang Kepariwisataa n Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau	1. <i>Attraction</i> 2. <i>Transportation</i>	a. Pengembangan dan pengelolaan paket wisata unggulan b. Keadaan panorama objek wisata c. Kebersihan, keindahan dan bentuk fisik objek wisata a. Ketersediaan transportasi b. Pengelolaan fasilitas umum seperti toilet, jalan dan mushola	a. Terlaksana b. Kurang terlaksana c. Tidak terlaksana

Suwanto, 1997; 90)	Rupat	<p>3. <i>Facility</i></p> <p>4. <i>Infrastructure</i></p> <p>5. <i>Hospitality</i></p>	<p>a. Ketersediaan tempat-tempat berbelanja disekitar objek wisata</p> <p>b. Sistem komunikasi dan listrik</p> <p>c. Lahan parkir</p> <p>a. Pengelolaan tata ruang bangunan di objek wisata</p> <p>b. Perawatan infrastuktur di objek wisata</p> <p>a. Peran masyarakat dalam mempromosikan objek wisata</p> <p>b. Peran masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian objek wisata</p>	
-----------------------	-------	--	--	--

F. Teknik Pengukuran

Untuk dapat menjelaskan gambaran tentang Pelaksanaan Tugas Bidang Kepariwisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupat, Pengukuran yang dipergunakan dalam penganalisaan adalah dengan menggunakan penelitian secara persentase, yaitu untuk kategori terlaksana dengan persentase 66 – 100 %, untuk kategori kurang terlaksana dengan persentase antara 34-65%, sedangkan untuk kategori tidak terlaksana dengan persentase 1- 33 %.

Terlaksana : Apabila Pelaksanaan pengembangan Objek Wisata yang ditetapkan berada pada kategori tinggi 66 – 100%.

Kurang terlaksana : Apabila Pelaksanaan Pengembangan Objek Wisata yang ditetapkan berada pada kategori sedang antara 34% - 65%.

Tidak terlaksana : Apabila Pelaksanaan pengembangan Objek Wisata yang ditetapkan berada pada kategori rendah 1 - 33%.

Kemudian untuk pengukuran masing-masing indikator dalam variabel pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Attraction*, dapat dikatakan :

Terlaksana : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 66-100 %

Kurang terlaksana : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 34-65 %.

Tidak terlaksana : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 1-33 %.

2. *Transportation*, dapat dikatakan :

Terlaksana : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 66-100 %

Kurang terlaksana : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 34-65 %.

Tidak terlaksana : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 1-33 %.

3. *Facility*, dapat dikatakan :

Terlaksana : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara
66-100 %

Kurang terlaksana : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara
34-65 %.

Tidak terlaksana : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 1-
33 %.

4. *Infrastrukture*, dapat dikatakan :

Terlaksana : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara
66-100 %

Kurang terlaksana : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara
34-65 %.

Tidak terlaksana : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 1-
33 %.

5. *Hospitality*, dapat dikatakan :

Terlaksana : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara
66-100 %

Kurang terlaksana : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara
34-65 %.

Tidak terlaksana : Apabila skor dari hasil tanggapan responden antara 1-
33 %.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian dalam penelitian adalah termasuk kedalam tipe *Survey Deskriptif* dengan menggunakan metode *Kuantitatif*. Hal ini sesuai menurut Singarimbun (1998:3) bahwa penelitian suvey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis karena Dinas Pariwisata berkewajiban melakukan yang khususnya berada pada Kabupaten Bengkalis yaitu Pantai Pulau Rukat yang merupakan objek wisata yang paling banyak di kunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bengkalis.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Kepariwisataan, Kepala Seksi Pengembangan Objek Wisata, Staf Seksi Pengembangan Objek Wisata dan pengunjung objek wisata pulau rukat.

2. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu :

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel.

No	Sub Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Kepariwisata	1 orang	1 orang	100 %
2	Staf Seksi Pengembangan Objek Wisata	14 orang	7 orang	50 %
3	Pengunjung Objek Wisata Pulau Rupa	~	50 orang	<i>Accidental sampling</i>
	Jumlah	15 orang	58 orang	

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

D. Teknik pengambilan sampel

Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk Kepala Bidang Kepariwisata, karena populasi relatif sedikit maka penentuan sampel menggunakan metode *Sensus* yaitu penulis memungkinkan menggunakan secara keseluruhan populasi yang ada untuk dijadikan sebagai responden.

Untuk Staf Seksi Pengembangan Objek Wisata, karena populasinya relative banyak maka penentuan sampel dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling yaitu penetapan sendiri besar sampel yang akan diambil. Ditetapkan sebesar 50 % dari jumlah populasi yang ada untuk dijadikan sebagai responden.

Untuk Pengunjung Objek Wisata Pulau Rupa menggunakan teknik *Accidental Sampling* yaitu penulis mengambil sampel dengan cara kebetulan atau mudah dijumpai dan berhubungan dengan penelitian ini (dalam hal ini penulis menetapkan sebanyak 49 orang dan sampel dapat berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian).

E. Jenis dan Sumber Data.

1. Data Primer

Merupakan data yang diambil secara langsung melalui tanya jawab langsung kepada responden tentang Pelaksanaan Tugas Bidang Kepariwisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa. Data primer tersebut berupa identitas responden, serta hasil kuisisioner dan wawancara mengenai indikator yang sudah ditetapkan

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga tidak bersifat otentik lagi, data sekunder dalam penelitian ini dan data-data pendukung lainnya yang berkenaan Pelaksanaan Tugas Bidang Kepariwisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa. Data sekunder berupa profil Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta foto dokumentasi penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kuisisioner adalah pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan penggunaan.
2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si pewawancara

dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)

3. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
4. Dokumentasi adalah Salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto-foto penulis dengan responden pada saat wawancara dan menyebarkan kuisioner.

G. Teknik Analisis Data.

Data primer dan data sekunder serta bahan-bahan yang diperlukan telah berhasil dikumpulkan, dan kemudian dipisahkan atau dikelompokkan sesuai dengan keperluan dan kegunaan penelitian. Analisis data dilakukan secara *Deskriptif* dari keseluruhan data yang diperoleh untuk menggambarkan dan menjelaskan secara lebih rinci bagaimana kenyataan yang sebenarnya. Untuk data Kuantitatif akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel yang jelas kemudian di tabulasi dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

H. Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.

Untuk mengetahui rencana jadwal waktu kegiatan penelitian, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III.2: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Bidang Kepariwisata Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupat

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020/2021															
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x	x	x	x												
2	Seminar UP						x	x									
3	Perbaikan UP							x	x								
4	Pembuatan daftar Kuisisioner									x	x						
5	Pengurusan rekomendasi penelitian									x							
6	Penelitian lapangan									x	x	x					
7	Penelitian dan analisis data									x	x	x	x				
8	Penyusunan laporan penelitian (skripsi)										x	x	x				
9	Konsultasi perbaikan skripsi													x	x		
10	Ujian skripsi															x	
11	Revisi dan perbaikan skripsi															x	x
12	Penggandaan serta penyerahan skripsi															x	x

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Riau, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan Ibu Kota nya Bengkalis.

Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera pada posisi antara $2^{\circ}30'$ – $0^{\circ} 56'$ Lintang Utara dan $100^{\circ}52'$ – $102^{\circ} 31'$ Bujur Timur. Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah $\pm 7.773,93 \text{ km}^2$ yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2009 tercatat sebanyak 484.757 jiwa yang terdiri dari 250. 265 jiwa laki-laki dan 234.492 jiwa perempuan.

Kabupaten Bengkalis memiliki 8 Kecamatan yang terdiri dari 102 desa/kelurahan. Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka.

B. Gambaran Umum Kecamatan Rupert Utara

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Rupert Utara sebagai lokasi penelitian yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Secara geografis Kecamatan Rupert Utara terletak pada posisi 101⁰25'43'' Lintang Utara 101⁰47'14'' Lintang Utara, dan 0⁰55'24'' Bujur Timur 2⁰7'14'' Bujur Timur. Luas Kecamatan Rupert Utara adalah 628,50 km², yang terbagi menjadi 5 desa yaitu Desa Tanjung Medang, Desa Teluk Rhu, Desa Tanjung Punak, desa Kadur, dan Desa Titi Akar.

Dengan Desa terluas adalah Desa Titi Akar dengan luas 300 km² atau sebesar 47,73% dari luas keseluruhan Kecamatan Rupert Utara dan Desa terkecil adalah Desa Tanjung Punak dengan luas 66 km² atau 10,50% dari luas keseluruhan. Desa dengan jarak lurus terjauh dari Ibu kota Kecamatan Rupert Utara adalah Desa Titi Akar dengan jarak lurus 25 km dan jarak terdekat adalah Desa Tanjung Medang sebagai Ibu Kota Kecamatan Rupert Utara.

Adapun batasan-batasan Kecamatan Rupert Utara adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rupert.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rupert.

Kecamatan Rupert Utara umumnya beriklim tropis dengan suhu antara 20 °C sampai 32 °C, dengan rata-rata curah hujan di Kecamatan Rupert Utara adalah 2007 mm/tahun, serta ketinggian kawasan dari permukaan air laut berkisar antara 0 sampai dengan 40 meter dpl. Grafik 1. Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Rupert Utara.

2. Kondisi Demografi.

1. Keadaan Penduduk.

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu wilayah dan sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan pembangunan, penduduk di Kecamatan Rupert Utara selalu mengalami perkembangan yang cukup pesat setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk Kecamatan Rupert Utara pada tahun 2011 sebanyak 15.256 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7.905 jiwa dan perempuan sebanyak 7.351 jiwa.

b. Agama.

Dibidang keagamaan Kecamatan Rupert utara merupakan salah satu Kecamatan yang sangat berpegang dengan nilai-nilai keagamaan dan agama islam merupakan agama mayoritas. Namun demikian bukan berarti di Kecamatan Rupert Utara tidak ada yang beragama non islam.

c. Pendidikan.

Pengembangan dan pembangunan daerah tidak terlepas dari ketersedianya Sumberdaya manusia yang berkualitas, dalam peningkatan kualitas sumber dayamanusia ini yang sangat berperan adalah dinas pendidikan karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka kualitas seseorang tersebut semakin tinggi.

Sesuai dengan Undang-undang pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah mengalokasikan 20% dana dari APBD untuk pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberi prioritas yang sama untuk setiap Kecamatan dalam Bidang Pendidikan, hal ini dapat dilihat dengan tersebarinya sarana pendidikan disetiap Kecamatan.

d. Kesehatan.

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan secara mudah, murah, dan merata. Dengan meningkatnya pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain menyediakan Fasilitas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mempersiapkan tenaga medis seperti Dokter, perawat, Bidan dan lain-lain, di Kecamatan Rupa Utara.

C. Gambaran Umum Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis merupakan suatu unsur Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok menjalankan Roda Pemerintahan terutama dalam bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, maka dari itu, diperlukan susunan organisasi dan tata kerja yang baik guna menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara terperinci dan sistematis.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis menjelaskan susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub bagian penyusunan program
 - b. Sub bagian umum dan kepegawaian, dan
 - c. Sub bagian keuangan dan perlengkapan
3. Bidang pariwisata, terdiri dari :
 - a. Seksi pengembangan destinasi pariwisata
 - b. Seksi pengembangan dan pembinaan ekonomi kreatif dan
 - c. Seksi pemasaran pariwisata
4. Bidang kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi nilai budaya
 - b. Seksi cagar budaya, permuseuman dan sejarah
 - c. Seksi kesenian
5. Bidang kepemudaan, terdiri dari :
 - a. Seksi pengembangan dan pemberdayaan pemuda
 - b. Seksi standarisasi dan infrastruktur kepemudaan, dan
 - c. Seksi kemitraan dan penghargaan kepemudaan.
6. Bidang olahraga, terdiri dari :
 - a. Seksi pendidikan olahraga, rekreasi dan tradisional
 - b. Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga, dan
 - c. Seksi kemitraan dan penghargaan olahraga
7. Unit pelaksana teknis, dan
8. Kelompok jabatan fungsional

Adapun penjabaran masing-masing tugas struktur organisasi pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Dalam menjalankan tugas tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah dibidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pariwisata, kebudayaan,

kepemudaan dan olahraga.

3. Pelaksanaan koordinasi penyedia infrastruktur dan pendukung dibidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Dalam menjalankan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtangnan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
3. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
4. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undang.
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagian Penyusunan Program

Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan sub bagian penyusunan program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian penyusunan program.
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian penyusunan program sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program dan anggaran kegiatan.
4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian penyusunan program serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
5. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan

petunjuk teknis dibidang penyusunan program.

6. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
7. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan rencana kerja tahunan/RKT dinas, arah kebijakan umum rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dan laporan pertanggung jawaban serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
8. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran.
9. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatur dan publik untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan.
10. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA.
11. Menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi.
12. Mengupayakan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya.
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
14. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian penyusunan program sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang

telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan.

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada sekretariat.

d. Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian.
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.
4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian serta menyiapkan

bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.

5. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya.
6. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai-pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas.
7. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor.
8. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas.
9. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
11. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebaga bahan masukan bagi atasan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada sekretariat.

d. Bagian Keuangan Dan Perlengkapan

Sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan

bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan dan perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan.
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.
4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
5. Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang.
6. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang.
7. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan

rencana kebutuhan barang.

8. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat kartu inventaris barang dan membuat kartu inventaris ruangan.
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat laporan pertanggung jawaban keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas.
10. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan.
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
12. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan sekretaris.

e. Bidang Kepariwisataan.

Bidang kepariwisataan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang kepariwisataan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. bidang kepariwisataan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan teknis kewenangan dibidang kepariwisataan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
2. Penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan dan pengendalian dibidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Penyusunan tata ruang kawasan strategis pariwisata.
4. Pelaksanaan promosi objek wisata baik dalam maupun luar negeri.
5. Penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan serta pengembangan kepariwisataan.
6. Penyelenggaraan dan pengawasan standar minimal dalam bidang kepariwisataan.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

f. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Seksi pengembangan destinasi pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan pengembangan destinasi pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pengembangan destinasi pariwisata.
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan dibidang pengembangan

destinasi pariwisata.

3. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan destinasi pariwisata.
4. Melaksanakan kebijakan dibidang pengembangan destinasi pariwisata.
5. Melaksanakan administrasi dibidang pengembangan destinasi pariwisata.
6. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan destinasi pariwisata.
7. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan destinasi pariwisata.
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan destinasi pariwisata.
9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

g. Seksi Pengembangan Dan Pembinaan Ekonomi Kreatif

Seksi pengembangan dan pembinaan ekonomi kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan pengembangan dan pembinaan ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan ekonomi kreatif.

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan dibidang pengembangan dan pembinaan ekonomi kreatif.
3. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan ekonomi kreatif.
4. Memberdayakan masyarakat dalam penyiapan ekonomi kreatif sebagai penunjang pariwisata.
5. Melakukan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif.
6. Melakukan pembinaan kewirausahaan ekonomi kreatif.
7. Melakukan administrasi dibidang pengembangan dan pembinaan ekonomi kreatif.
8. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan dan pembinaan ekonomi kreatif.
9. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise dibidang pengembangan destinasi pariwisata.
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala biang sesuai dengan tugasnya.

h. Seksi Pemasaran Pariwisata

Seksi pemasaran pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pemasaran program dan strategi pemasaran, serta pengembangan komunikasi prasarana pariwisata.
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan dibidang pemasaran pariwisata.
3. Mengkoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemasaran pariwisata.
4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan mitra kerja pariwisata.
5. Melakukan pemasaran pariwisata Kabupaten Bengkalis ke mancanegara.
6. Menyiapkan bahan-bahan pemasaran pariwisata.
7. Melakukan pembinaan terhadap mitra pariwisata.
8. Melaksanakan administrasi dibidang pemasaran pariwisata.
9. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di pemasaran pariwisata.
10. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemasaran pariwisata.
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pemasaran pariwisata.
12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

i. Bidang Kebudayaan

Bidang kebudayaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang kebudayaan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas tersebut, bidang kebudayaan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis kewenangan dibidang kebudayaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati.
2. Penyusunan dan pelaksanaan program pembanguan dan pengendalian dibidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Penyelenggaraan dan pengawasan standar minimal dalam bidang kebudayaan.
4. Penyelenggaraan dan pengawasan standar minimal dalam bidang kebudayaan.
5. Pelaksanaan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala kabupaten, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya

j. Seksi Nilai Budaya

Seksi nilai budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan yang

berhubungan dengan nilai budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang nilai budaya.
2. Menyusun bahan pembinaan dibidang nilai budaya.
3. Menyusun bahan pelestarian nilai budaya.
4. Menyusun koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang nilai budaya.
5. Menyiapkan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang nilai budaya.
6. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang nilai budaya.
7. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang nilai budaya, dan
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

k. Seksi Cagar Budaya, Permuseuman Dan Sejarah

Seksi cagar budaya, permuseuman dan sejarah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan cagar budaya, permuseuman dan sejarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut adalah

1. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, permuseuman serta dibidang sejarah.
2. Menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, permuseuman serta sejarah.
3. Menyusun bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum.
4. Menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah provinsi.
5. Menyusun bahan pemantauan dan evalyuai dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, permuseuman dan sejarah.
6. Melaporkan dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, permuseuman dan sejarah, dan
7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

1. Seksi Kesenian

Seksi kesenian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan seksi kesenian berdasarkan data kegiatan tahunan sebelumnya dan sumber daya yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang telah ditetapkan.

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi kesenian.
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi kesenian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.
4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas seksi kesenian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
5. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan kesenian dan kepercayaan yang berkembang pada masyarakat.
6. Memfasilitasi dan mengelola kesenian daerah dan kegiatan kesenian dan kepercayaan yang berkembang pada masyarakat.
7. Membina dan mengembangkan potensi budaya daerah yang ada menjadi kelompok kesenian yang profesional.
8. Mengajukan usul calon penerima penghargaan dalam bidang kesenian pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
9. Memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang kebudayaan mengenai langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil.
10. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi bina budaya sesuai

dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan.

11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

m. Bidang Kepemudaan

Bidang kepemudaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang kepemudaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas tersebut, bidang kepemudaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan kepemudaan.
2. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi kelembagaan, produktifitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga-lembaga masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengurusan serta pengendalian program pendayagunaan dibidang kepemudaan.
4. Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana kepemudaan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

n. Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan Pemuda

Seksi pengembangan dan pemberdayaan pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan pengembangan dan pemberdayaan pemuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan dibidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda serta merumuskan kebijakan dibidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda, dan mensinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.
3. Menyusun norma, struktur, prosedur dan kriteria dibidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda,

peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda serta dibidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.

4. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan dibidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda dan dibidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.
5. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda dan dibidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.
6. Melaksanakan administrasi bidang pengembangan dan pemberdayaan pemuda
7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

o. Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Kepemudaan

Seksi standarisasi dan infrastruktur kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan standarisasi dan infrastruktur kepemudaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut adalah

1. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang standarisasi dan infrastruktur kepemudaan.
2. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang standarisasi dan infrastruktur kepemudaan.
3. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang standarisasi dan infrastruktur kepemudaan.
4. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang standarisasi dan infrastruktur kepemudaan.
5. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang standarisasi dan infrastruktur kepemudaan, dan
6. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

p. Seksi Kemitraan Dan Penghargaan Kepemudaan

Seksi kemitraan dan penghargaan kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan kemitraan dan penghargaan kepemudaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian

tugas tersebut adalah

1. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang kemitraan dan penghargaan kepemudaan.
2. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kemitraan dan penghargaan kepemudaan.
3. Menyiapkan penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria dibidang kemitraan dan penghargaan kepemudaan.
4. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang kemitraan dan penghargaan kepemudaan.
5. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang kemitraan dan penghargaan kepemudaan
6. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

q. Bidang Olahraga

Bidang olahraga mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang olahraga sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas tersebut, bidang olahraga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga
2. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi penyelenggaraan permasalahan pembibitan,

peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga-lembaga masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengurusan serta pengendalian program pendayagunaan dibidang olahraga.
4. Perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana olahraga.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan dengan tugas dan fungsinya.

r. Seksi Pendidikan Olahraga, Rekreasi Dan Tradisional

Seksi pendidikan olahraga, rekreasi dan tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan pendidikan olahraga, rekreasi dan tradisional dengan ketentuan yang berlaku. Adapun uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi dan tradisional.
2. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi dan tradisional.
3. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi dan tradisional
4. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi dan tradisional.

5. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi dan tradisional.
6. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

s. Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga

Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan standarisasi dan infrastruktur olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

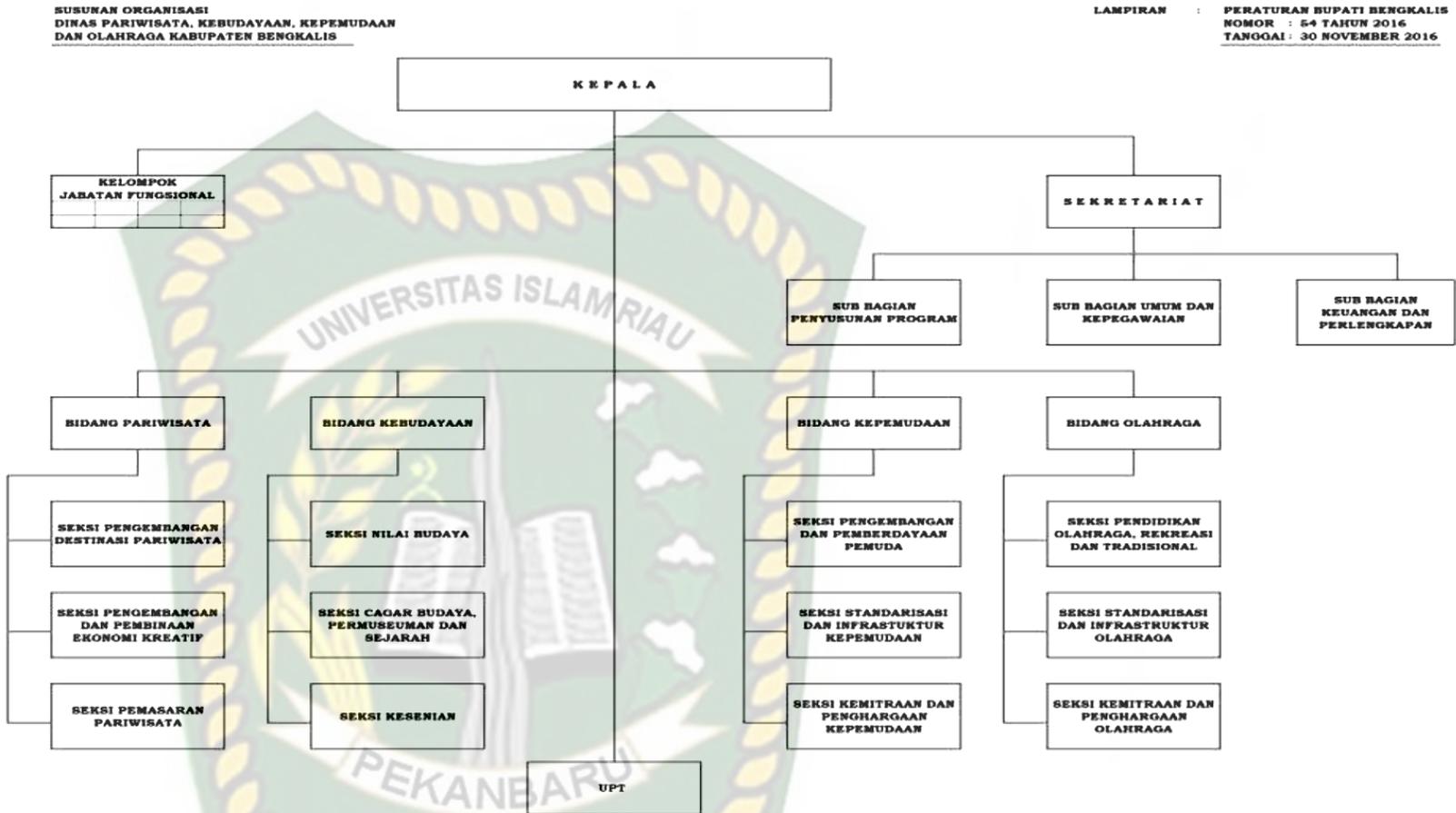
1. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga.
2. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga.
3. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga.
4. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga.
5. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga.
6. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

t. Seksi Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga

Seksi kemitraan dan penghargaan olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan kemitraan dan penghargaan olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga.
2. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga.
3. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga.
4. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga.
5. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga.
6. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan bab V ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari para responden. Oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan para responden. Adapun identitas responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

a. Umur Responden

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktifitas kerja. Semakin lanjut usai seseorang maka akan mempengaruhi produktifitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur Respondan	Jumlah	Persentase
1	< 20 Tahun	7 orang	12 %
2	21-30 Tahun	29 orang	50 %
3	31-40 Tahun	19 orang	33 %
4	>41 tahun	3 orang	5 %
	Jumlah	58 orang	100 %

Jumlah : data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan umur adalah dari 58 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 7 orang atau

12 % berumur < 20 tahun, sebanyak 29 orang atau 50 % berumur antara 21-30 tahun, sebanyak 19 orang atau 33 % berumur antara 31-40 tahun dan sebanyak 3 orang atau 5 % berumur > 40 tahun.

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktifitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktifitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain.

2. Jenis Kelamin

Berikut ini diuraikan responden berdasarkan jenis kelamin adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Umur Respondan	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	45 orang	78 %
2	Perempuan	13 orang	22 %
	Jumlah	58 orang	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel V.2 diatas, dapat diketahui identitas responden berdasarkan umur adalah dari 58 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 45 orang atau 78 % berjenis kelami laki-laki dan sebanyak 13 orang atau 22 % berjenis kelamin perempuan.

Selain umur, jenis kelamin juga dapat berpengaruh dari pekerjaan yang diberikan. Pada umumnya pekerjaan laki-laki lebih berat dibandingkan dengan

pekerjaan perempuan. Tetapi sebagian perusahaan atau instansi mempekerjakan seseorang bukan dilihat dari jenis kelamin, tetapi lebih dari kemampuan dan pendidikan yang dimiliki pegawai tersebut.

3. Jenjang Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin matang pola pikir seseorang untuk dapat melihat dan menganalisa serta penjelasan informasi dalam kabutuhan peneitian. Sehingga dengan adanya tingkat pendidikan ini akan memberikan gambaran yang jelas terhadap tingkat kebenaran. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan penelitian ini pendidikan responden merupakan langkah awal yang harus dipenuhi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang digolongkan dalam tingkat pendidikan yang akan paparkan pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	3 orang	5 %
2	SLTP	14 orang	24 %
3	SLTA	32 orang	55 %
4	Diploma	0	0
5	Strata 1	9 orang	16 %
6	Strata 2	0	0
	Jumlah	58 orang	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel V.3 dapat diketahui identitas responden berdasarkan jenjang pendidikan adalah dari 58 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 3 orang atau 5 % berjenjang pendidikan SD, sebanyak 14 orang atau 24 % berjenjang pendidikan SLTP, sebanyak 32 orang atau 55 % berjenjang pendidikan SLTA dan sebanyak 9 orang atau 16 % berjenjang pendidikan Strata 1.

B. Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupert Tahun 2019

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis memiliki salah satu fungsi yaitu pelaksanaan pengembangan objek wisata yang ada di kabupaten Bengkalis. Salah satu objek wisata yang terdapat di Kabupaten Bengkalis adalah Pantai Pulau Rupert, setelah diadakannya penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupert, hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan pengembangan objek wisata pada pantai pulau rupert belum berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, adapun pengembangan objek wisata yang tidak berjalan. Adapun aspek-aspek yang menjadi indikator untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan objek wisata pantai pulau rupert adalah sebagai berikut:

1. *Attraction*

Atraksi adalah pusat dari industri pariwisata. Atraksi merupakan sesuatu yang mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tujuan wisata adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan atau permintaan. Biasanya para wisatawan tertarik pada suatu lokasi karena ciri-ciri khas tertentu. Kriteria ini dapat diuraikan menjadi beberapa indikator sebagai berikut.

- a. Memiliki daya tarik wisata khususnya daya tarik wisata budaya;

- b. Memiliki setidaknya lebih dari satu atraksi yang memanfaatkan dan menjunjung tinggi budaya local.

Untuk mengetahui tanggapan responden dari pengunjung mengenai atraksi dalam pengembangan objek wisata pantai pulau rupert adalah sebagai berikut:

Table V.4 Tanggapan Responden Dari Pengunjung Mengenai Atraksi Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupert

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pengembangan dan pengelolaan paket wisata unggulan	0	39	11	50
2	Keadaan panorama objek wisata	0	41	9	50
3	Kebersihan, keindahan dan bentuk fisik objek wisata	12	29	9	50
	Jumlah	12	106	29	150
	Rata-Rata	4	35	11	50
	Persentase	8 %	70 %	28 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui tanggapan responden dari pengunjung mengenai atraksi dalam pengembangan objek wisata pantai Pulau Rupert adalah dari 50 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 4 orang atau 8 % menyatakan terlaksana, sebanyak 35 % atau 70 % menyatakan kurang terlaksana dan sebanyak 11 orang atau 28 % menyatakan tidak terlaksana. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan pengembangan yang dilakukan oleh bidang kepariwisataan terhadap objek wisata dan daya tarik wisata pantai pulau rupert dapat dikatakan

kurang terlaksana. Hal ini terlihat dari kurangnya daya tarik wisata yang ada di pantai pulau rupert.

Selanjutnya tanggapan dari staff seksi pengembangan objek wisata mengenai atraksi pengembangan objek wisata pantai pulau Rupert adalah sebagai berikut :

Table V.5 Tanggapan Dari Staff Seksi Pengembangan Objek Wisata Mengenai Atraksi Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupert

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pengembangan dan pengelolaan paket wisata unggulan	4	3	0	7
2	Keadaan panorama objek wisata	5	2	0	7
3	Kebersihan, keindahan dan bentuk fisik objek wisata	7	0	0	7
	Jumlah	16	5	0	21
	Rata-Rata	5	2	0	7
	Persentase	71%	29%	0	100%

Sumber : data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel V.5 diatas dapat diketahui tanggapan dari staff seksi pengembangan objek wisata mengenai atraksi pengembangan objek wisata pantai pulau Rupert adalah dari 7 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 5 orang atau 71 % menyatakan terlaksana dan sebanyak 2 orang atau 29 % menyatakan kurang terlaksana.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kepariwisata mengenai atraksi pengembangan objek wisata pantai pulau rupert adalah

“...kami menyadari dalam pelaksanaan program pengembangan objek pantai pulau rupert belum mencapai hasil yang maksimal, untuk itu peran serta masyarakat untuk mengsucceskan pengembangan pantai pulau rupert juga sangat kami butuhkan sehingga terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat setempat terutama dalam mengelola daya tarik objek wisata”. (hasil wawancara tanggal 16 Juni 2021)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di pantai pulau rupert bahwa pengembangan atraksi di objek wisata tersebut masih kurang berjalan, hal ini penulis melihat bahwa belum adanya paket wisata unggulan yang bisa dijual kepada wisatawan sehingga wisatawan terkadang malas untuk datang karena hanya sekedar melihat pantai saja.

Dari hasil kuisiner dan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwasannya atraksi pengembangan objek wisata pantai pulau rupert dapat dikatakan kurang terlaksana. Hal ini terlihat dari bentuk fisik objek wisata yang tidak adanya penambahan-penambahan yang membuat objek wisata ini diminati oleh wisatawan selain itu tidak adanya penambahan atau pembuatan event-event selain festival pantai rupert sehingga wisatawan kurang tertarik untuk datang ke objek wisata tersebut.

2. *Transportation*

Unsur transportasi meliputi unsur pengangkutan serta moda bagi wisatawan untuk mencapai tempat wisata. Untuk mengetahui tanggapan responden dari

pengunjung mengenai transportasi dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata pantai pulau rupa adalah sebagai berikut :

Table V.6 Tanggapan Responden Dari Pengunjung Mengenai Transportasi Dalam Pelaksanaan Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Ketersediaan transportasi	0	34	16	50
2	Pengelolaan fasilitas umum seperti toilet, jalan dan mushola	0	31	19	50
	Jumlah	0	65	35	100
	Rata-Rata	0	33	17	50
	Persentase	0	66 %	34 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel V.6 diatas dapat diketahui tanggapan responden dari pengunjung mengenai transportasi dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata pantai pulau rupa adalah dari 50 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 33 orang atau 66 % menyatakan kurang terlaksana dan sebanyak 17 orang atau 34 % menyatakan tidak terlaksana. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya transportasi dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata pantai pulau Rupa dapat dikatakan kurang terlaksana, hal ini pengelolaan fasilitas umum yang masih sangat buruk. Banyak fasilitas yang sudah mengalami kerusakan dan belum banyaknya transportasi menuju objek wisata. Pengunjung kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju ke objek wisata tersebut.

Selanjutnya tanggapan dari staff seksi pengembangan objek wisata mengenai transportasi dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata pantai pulau Rupert adalah sebagai berikut :

Tabel V.7 Tanggapan Dari Staff Seksi Pengembangan Objek Wisata Mengenai Transportasi Dalam Pelaksanaan Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupert

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Ketersediaan transportasi	2	5	0	7
2	Pengelolaan fasilitas umum seperti toilet, jalan dan mushola	7	0	0	7
	Jumlah	9	5	0	14
	Rata-Rata	5	2	0	7
	Persentase	71 %	29 %	0	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel V.7 diatas dapat diketahui tanggapan dari staff seksi pengembangan objek wisata mengenai transportasi dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata pantai pulau Rupert adalah dari 7 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 5 orang atau 71 % menyatakan terlaksana dan sebanyak 2 orang atau 29 % menyatakan kurang terlaksana.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kepariwisata mengenai transportasi dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata pantai pulau Rupert adalah

“...untuk transportasi sudah cukup memadai untuk menuju ke objek wisata tersebut, kami akan lebih berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait keadaan transportasi menuju ke objek wisata pantai pulau rupa”. (hasil wawancara tanggal 16 Juni 2021)

Hasil observasi yang penulis lakukan di objek wisata pantai pulau rupa bahwa pengembangan transportasi pada objek wisata tersebut masih kurang, untuk menuju ke objek wisata tersebut belum ada kendaraan umum seperti angkot dan sejenis nya. Untuk menuju ke objek wisata tersebut, hanya ada ojek yang merupakan masyarakat setempat dan menggunakan kendaraan pribadi saja. Ini membuat objek wisata tersebut kurang dikenal dengan wisatawan.

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada responden mengenai transportasi dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata pantai pulau Rupa adalah dapat dikatakan kurang terlaksana. Perlu adanya pengelolaan sarana wisata yang lebih tersusun oleh Dinas Pariwisata, karena secara fisik keadaan sarana wisata di Pantai pulau rupa ini sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, selain itu wisatawan juga tidak bisa menikmati pemandangan pantai dengan nyaman karena tidak tersedianya fasilitas-fasilitas seperti kursi, meja maupun pondok-pondok untuk berteduh dan beristirahat. Selain itu juga fasilitas umum yang kebanyakan sudah mengalami kurasaan serta tidak adanya kendaraan umum menuju pantai pulau rupa ini sehingga perkembangan pantai ini sangat lambat.

3. Facility

Unsur fasilitas cenderung berorientasi pada atraksi disuatu lokasi karena fasilitas harus dekat dengan pasarnya. Fasilitas cenderung mendukung dan bukan

mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah atraksi berkembang. Suatu atraksi juga dapat merupakan fasilitas. Jumlah dan jenis fasilitas tergantung kebutuhan wisatawan.

Menurut Gunn dan Turgut (2002; 56) fasilitas merupakan fasilitas pelayanan dan sarana prasarana penunjang pariwisata yang nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan wisatawan selama berwisata di suatu tempat. Dalam karakteristik ini, fasilitas yang dimaksud meliputi fasilitas dasar dan penunjang kegiatan wisata.

Untuk mengetahui tanggapan responden dari pengunjung mengenai fasilitas dalam pengembangan objek wisata pantai pulau rupat adalah sebagai berikut :

Table V.8 Tanggapan Responden Dari Pengunjung Mengenai Fasilitas Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupat

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Ketersediaan tempat-tempat berbelanja disekitar objek wisata	12	38	0	50
2	System komunikasi dan listrik	0	34	16	50
3	Lahan parkir	0	29	21	50
	Jumlah	12	101	37	150
	Rata-Rata	4	34	12	50
	Persentase	8 %	68 %	24 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat diketahui tanggapan responden dari pengunjung mengenai fasilitas dalam pengembangan objek wisata pantai pulau rupat adalah dari 50 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 4 orang atau 8 %

menyatakan terlaksana, sebanyak 34 orang atau 68 % menyatakan kurang terlaksana dan sebanyak 12 orang atau 24 % menyatakan tidak terlaksana. Berdasarkan tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya pengembangan fasilitas di objek wisata pantai pulau rupat dapat dikatakan kurang terlaksana. Hal ini terlihat dari Hal ini terlihat dari akomodasi pantai yang merupakan salah satu sarana pariwisata yang sangat dibutuhkan oleh para pengunjung yang akan menginap di tempat wisata tersebut.

Selanjutnya tanggapan dari staff seksi pengembangan objek wisata mengenai pengembangan fasilitas di objek wisata pantai pulau Rupert adalah sebagai berikut :

Table V.9 Tanggapan Dari Staff Seksi Pengembangan Objek Wisata Mengenai Pengembangan Fasilitas Di Objek Wisata Pantai Pulau Rupert

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Ketersediaan tempat-tempat berbelanja disekitar objek wisata	2	5	0	7
2	System komunikasi dan listrik	7	0	0	7
3	Lahan parkir	4	3	0	7
	Jumlah	13	8	0	21
	Rata-Rata	4	3	0	7
	Persentase	57 %	43 %	0	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel V.9 diatas dapat diketahui tanggapan dari staff seksi pengembangan objek wisata mengenai penetapan standar dalam pelaksanaan pengawasan pengembangan objek wisata pantai pulau Rupert adalah dari 7 orang yang

dijadikan sebagai responden sebanyak 4 orang atau 57 % menyatakan terlaksana dan sebanyak 3 orang atau 43 % menyatakan kurang terlaksana.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kepariwisata mengenai pengembangan fasilitas pada objek wisata pantai pulau rupert adalah

“...mengenai fasilitas memang sudah banyak yang tidak layak lagi. Kami akan melakukan penambahan terkait bungalow untuk tempat duduk-duduk bagi pengunjung serta tempat bilas apabila ada pengunjung yang berenang di pantai pulau rupert. Kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak PUPR terkait fasilitas yang sudah mengalami kerusakan di objek wisata tersebut”. (hasil wawancara tanggal 16 Juni 2021)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa fasilitas di objek wisata tersebut sudah banyak mengalami kerusakan seperti toilet dan sejenisnya sehingga apabila pengunjung ingin membilas badan menggunakan air aqua.

Dari hasil kuisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwasannya Pengembangan Fasilitas Pada Objek Wisata Pantai Pulau Rupert dapat dikatakan kurang terlaksana. Hal ini terlihat dari akomodasi pantai yang merupakan salah satu sarana pariwisata yang sangat dibutuhkan oleh para pengunjung yang akan menginap di tempat wisata tersebut. Standar fasilitas akomodasi yang harus tersedia adalah tempat parkir, WC atau kamar mandi, lobby, ruang tunggu, tempat makan / restoran, tempat sampah, penyediaan prasarana seperti air bersih, listrik, dan binatu. Selain itu juga seperti fasilitas belanja juga diperlukan misalnya seperti pertokoan di mall. Sangat baik untuk menempatkan toko – toko yang menjual makanan dan

perlengkapan lain diletakkan bersebelahan sebagai upaya menciptakan minat pengunjung untuk membeli barang – barang yang dijual.

Sejalan dengan hal diatas, tempat parkir juga merupakan salah satu hal yang penting di objek wisata. Luas ruang parkir standar yang diperlukan satu mobil adalah 4.8 x 2.3 meter (Ditjen Perhubungan Darat,1995:114). Besarnya areal parkir yang diperlukan tergantung pada jumlah kendaraan dan jarak antar kendaraan yang ditentukan, desain untuk akses dan sirkulasi kendaraan serta penyediaan fasilitas umum yang didasarkan pada hasil persepsi dan preferensi pengunjung terhadap kondisi fasilitas umum yang telah tersedia saat ini seperti WC, Mushola, penyewaan perlengkapan wisata, kios makan, sarana permainan serta pusat informasi.

4. Infrastructure

Unsur Atraksi dan fasilitas tidak dapat tercapai dengan mudah jika belum terdapat infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di atas tanah dan suatu wilayah atau daerah.

Untuk mengetahui tanggapan responden dari pengunjung mengenai pengembangan infrastruktur pada objek wisata pantai pulau rupa adalah sebagai berikut :

Table V.10 Tanggapan Responden Dari Pengunjung Mengenai Pengembangan Infrastruktur Pada Objek Wisata Pantai Pulau Rupat

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pengelolaan tata ruang bangunan di objek wisata	12	29	9	50
2	Perawatan infrastruktur di objek wisata	0	35	15	50
	Jumlah	12	64	24	150
	Rata-Rata	6	32	12	50
	Persentase	12 %	64 %	24 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel V.10 diatas dapat diketahui tanggapan responden dari pengunjung mengenai pengembangan infrastruktur pada objek wisata pantai pulau rupert adalah dari 50 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 6 orang atau 12 % menyatakan terlaksana, sebanyak 32 orang atau 64 % menyatakan kurang terlaksana dan sebanyak 12 orang atau 24 % menyatakan tidak terlaksana. Dari hasil tanggapan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya pengembangan infrastruktur pada objek wisata pantai pulau rupert adalah dapat dikatakan kurang terlaksana, hal ini dilihat dari kenyataannya di lapangan, memang bangunan penunjang seperti balai yang tidak tertata dengan teratur sehingga terkesan bangunan di sekitar objek wisata Pantai pulau rupert tersebut tidak tertata dengan rapi sehingga kurang menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung, tentunya perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah agar pembagunan infraktruktur dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya tanggapan dari staf seksi pengembangan objek wisata mengenai pengembangan infrastruktur pada objek wisata pantai pulau rupa adalah sebagai berikut :

Tabel V.11 Tanggapan Dari Staf Seksi Pengembangan Objek Wisata Mengenai Pengembangan Infrastruktur Pada Objek Wisata Pantai Pulau Rupa

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pengelolaan tata ruang bangunan di objek wisata	4	3	0	7
2	Perawatan infrastruktur di objek wisata	5	2	0	7
	Jumlah	9	5	0	14
	Rata-Rata	5	2	0	7
	Persentase	71 %	29 %	0	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel V.11 diatas dapat diketahui tanggapan dari staf seksi pengembangan objek wisata mengenai pengembangan infrastruktur pada objek wisata pantai pulau rupa adalah dari 7 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 5 orang atau 71 % menyatakan terlaksana dan sebanyak 2 orang atau 29 % menyatakan kurang terlaksana.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Bidang Pariwisata mengenai pengembangan infrastruktur pada objek wisata pantai pulau rupa adalah

“...berbicara masalah infrastruktur pada objek wisata khususnya di pantai Pulau Rukat tidak terlepas dari anggaran yang di sediakan untuk pelaksanaan pembangunan, kami hanya menunggu perintah dari atasan kalau ada dana kami kerjakan tetapi kalau tidak kami hanya menunggu saja” (hasil wawancara tanggal 16 Juli 2021)

Hasil observasi yang penulis lakukan bahwa infrastruktur di objek wisata tersebut sudah banyak mengalami kerusakan dan tidak terawat. Ada satu tempat bilas, hanya saja sudah mengalami kerusakan dan air sering tidak keluar serta toilet yang sudah kotor.

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada responden mengenai pengembangan infrastruktur pada objek wisata pantai pulau rukat adalah maka dapat dikatakan kurang terlaksana, hal ini kondisi fisik bangunan-bangunan dan tata ruang di sekitar objek wisata yang sangat tidak terawat, dan sudah ditumbuhi dengan rumput-rumput liar, hal ini tentunya membuat pengunjung tidak nyaman untuk berkunjung di objek wisata tersebut.

5. *Hospitaly*

Keramah-tamahan masyarakat akan menjadi cerminan keberhasilan sebuah sistem pariwisata yang baik. Untuk mengetahui tanggapan dari pengunjung mengenai pengembangan hospitaly pada objek wisata pantai pulau rukat adalah sebagai berikut:

Table V.12 Tanggapan Dari Pengunjung Mengenai Pengembangan Hospitality Pada Objek Wisata Pantai Pulau Rupa

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Peran masyarakat dalam mempromosikan objek wisata	0	34	16	50
2	Peran masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian objek wisata	0	31	19	50
	Jumlah	0	65	35	100
	Rata-Rata	0	33	17	50
	Persentase	0	66 %	34 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel V.12 diatas dapat diketahui tanggapan dari pengunjung mengenai pengembangan hospitality pada objek wisata pantai pulau rupa adalah dari 50 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 33 orang atau 66 % menyatakan kurang terlaksana dan sebanyak 17 orang atau 34 % menyatakan tidak terlaksana. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pengembangan hospitality pada objek wisata pantai pulau Rupa dapat dikatakan kurang terlaksana, hal ini dilihat dari sekitar objek wisata Pantai Pulau Rupa, tidak banyak pedagang yang menjual makanan maupun “buah tangan” dari objek wisata tersebut, hal tersebut tidak terlepas dari sarana yang disediakan di sekitar objek wisata pantai pulau rupa tentunya peran serta dan perhatian pemerintah khususnya pihak Dinas harus lebih ditingkatkan lagi.

Selanjutnya tanggapan dari staff seksi pengembangan objek wisata mengenai pengembangan hospitaly pada objek wisata pantai pulau Rupert adalah sebagai berikut:

Tabel V.13 Tanggapan Dari Staff Seksi Pengembangan Objek Wisata Mengenai Pengembangan Hospitaly Pada Objek Wisata Pantai Pulau Rupert

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Peran masyarakat dalam mempromosikan objek wisata	2	5	0	7
2	Peran masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian objek wisata	7	0	0	7
	Jumlah	9	5	0	14
	Rata-Rata	5	2	0	7
	Persentase	71 %	29 %	0	100 %

Sumber : data olahan tahun 2016

Berdasarkan tabel V.13 diatas dapat diketahui tanggapan dari staff seksi pengembangan objek wisata mengenai pengembangan hospitaly pada objek wisata pantai pulau Rupert adalah dari 7 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 5 orang atau 71 % menyatakan terlaksana dan sebanyak 2 orang atau 29 % menyatakan kurang terlaksana.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pariwisata mengenai Pengembangan Hospitaly pada Objek Wisata Pantai Pulau Rupert adalah

“...kondisi sarana di objek wisata pantai pulau rupat memang sudah banyak yang tidak layak pakai, dalam artian banyak yang rusak tetapi setelah kami melakukan pengamatan di lapangan, ternyata kerusakan sarana-sarana tersebut tidak lain disebabkan oleh para pengunjung dan masyarakat yang menggunakan sarana tersebut tidak bertanggung jawab”. (hasil wawancara tanggal 16 Juli 2021)

Hasil observasi yang penulis lakukan bahwa masyarakat masih kurang berperan aktif dalam menjaga objek wisata tersebut dan masih banyak masyarakat setempat yang dengan sengaja membuang sampah sembarangan. Hal inilah yang menimbulkan kebiasaan bagi wisatawan untuk meniru kebiasaan dari penduduk setempat.

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada responden mengenai Pengembangan Hospitality pada Objek Wisata Pantai Pulau Rupat adalah dapat dikatakan kurang terlaksana. Perlu adanya pengelolaan sarana wisata yang lebih tersusun oleh Dinas Pariwisata, karena secara fisik keadaan sarana wisata di Pantai pulau rupat ini sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, selain itu wisatawan juga tidak bisa menikmati pemandangan pantai dengan nyaman karena tidak tersedianya fasilitas-fasilitas seperti kursi, meja maupun pondok-pondok untuk berteduh dan beristirahat.

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Table V.14 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rukat Tahun 2019

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	<i>Attraction</i>	9	37	11	57
2	<i>Transportation</i>	5	35	17	57
3	<i>Facility</i>	8	37	12	57
4	<i>Infrastructure</i>	11	34	12	57
5	<i>Hospitality</i>	5	35	17	57
	Jumlah	38	178	69	285
	Rata-Rata	8	35	14	57
	Persentase	14 %	61 %	25%	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

Berdasarkan table V.14 diatas dapat diketahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rukat Tahun 2019 adalah dari 57 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 8 orang atau 14 % menyatakan terlaksana, sebanyak 35 orang atau 61 % menyatakan kurang terlaksana dan sebanyak 14 orang atau 25 % menyatakan kurang terlaksana. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rukat Tahun 2019 dapat dikatakan kurang terlaksana yang ditentukan oleh 5 (lima) indicator dengan hasil rekapitulasi sebanyak 61 %.

C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa

Dalam pelaksanaan tugas tidak terlepas dari kendala-kendala yang akan dihadapi mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan. Demikian juga dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugasnya dalam pengembangan objek wisata Pantai Pulau Rupa. Adapun hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Objek wisata dan daya tarik wisata

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang dapat mengkapitalisasi potensi kebudayaan dan pariwisata, sehingga objek wisata tersebut kurang memiliki daya tarik pengunjung.

2. Prasarana dan Sarana objek wisata serta Infrastruktur

Dana yang terbatas yang dapat mempengaruhi tidak lancarnya pembangunan pariwisata sehingga banyak sarana prasarana serta infrastruktur yang ada di objek wisata tersebut sudah dalam keadaan rusak.

Rendahnya Informasi Pariwisata yang teroganisir dan terarah untuk dapat dijangkau wisatawan.

3. Masyarakat dan lingkungan

Rendahnya kesadaran dari masyarakat setempat tentang pentingnya pengembangan pariwisata sehingga objek wisata kurang dikenal oleh masyarakat luar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa maka dapat disimpulkan bahwasannya

1. Dari hasil kuisisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa dapat dikatakan kurang terlaksana, dengan hasil rekapitulasi responden sebanyak 61 %. Hal ini didasarkan pada 5 indikator yang sudah penulis tetapkan.
2. Factor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Pulau Rupa adalah
 - a. Dana yang terbatas yang dapat mempengaruhi tidak lancarnya pembangunan pariwisata daerah karena APBD masih belum cukup untuk pembangunan pariwisata di Kabupaten Bengkalis;
 - b. Rendahnya Informasi Pariwisata yang teroganisir dan terarah untuk dapat dijangkau wisatawan;

- c. Kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengkapitalisasi potensi kebudayaan dan pariwisata;
- d. Rendahnya kesadaran dari masyarakat setempat tentang pentingnya pengembangan pariwisata di daerah.

C. Saran

1. Pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga harus lebih aktif dalam mengembangkan potensi objek wisata sehingga dapat menarik perhatian wisatawan.
2. Perlu adanya pembenahan Sarana, Prasarana, Infrastruktur dan Tata Laksana yang menyeluruh sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung yang berwisata ketempat tersebut.
3. Pihak Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana anggaran dalam pengembangan objek wisata.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Alim Sumarno, 2012, *Penelitian Kausalitas Komparatif*, Elearning Unesa Arihdya, Surabaya.
- Admosudirjo, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fandeli, Chafid, 1995, *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*, Yogyakarta, Liberty.
- Faustino, C. Gomes, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- Handoko, 1997, *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Iskandar Wiryokusumo, 2011, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, Bumi Aksara, Jakarta
- Jayadi, Ahmad. 2000. *Prospek Otonomi Daerah*, PT Gramedia, Jakarta
- Kurniawan, Agung, 2005, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Latif, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintahan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Manulang, 1998, *Dasar-Dasar Manajemen*, Medan, Ghalia Indonesia arikunto.
- Musanef, 2002, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta, CV Haji Masagung.
- Ndraha, 2010, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya.
- Riduwan, 2012, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, Alfabeta, Bandung.
- Sarwoto, 1991, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Santoso, 2004, *Menembus Otodoksi Kajian Kebijakan Publik*, Fisipol UGM, Yogyakarta
- Sedarmayanti, 2000, *Good Goverment*, Mandar Maju, Bandung.

- Singarimbun, 1998, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES.
- Silalahi, Ulbert, 2009, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung, Sinar Baru Algensindi
- Siswanto, Bedjo, 1998, *Manajemen Modern*, Bandung, Sinar Baru Bandung.
- Siagian, P Sondang, 2003, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta, Bumi Askara.
- Simatupang, Violetta, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Bandung, PT Alumni.
- Suwantoro, Gamal, 1997, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2009, *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung.
- Pitana dan Gayatri, 2009, *Sosiologi Pariwisata*, Denpasar, Andi Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik, (Teori dan Proses)*, Rineka Cipta, Bandung
- Wibawa, 1992, *Kebijakan dan Pemecahan Masalah*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR.